



**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN
2013-2017**

SEKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

OLEH

**APRIL
NIM. 15 402 00245**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

OLEH

APRIL
NIM. 15 402 00245

PEMBIMBING I


Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II


Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 2018 2 001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **April**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Maret 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **April** yang berjudul "**Analisis Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 2018 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : April
NIM : 15 402 00245
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : **Analisis Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2020

Saya yang Menyatakan,



April

NIM. 15 402 00245

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : April
NIM : 15 402 00245
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 04 Maret 2020

Yang menyatakan,



April
NIM. 15 402 00245



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : April
NIM : 15 402 00245
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah IE-2
JUDUL SKRIPSI : Analisis Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19831703 201801 2 001

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19831703 201801 2 001

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP. 19841130 201801 2 001

Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 08 Juni 2020
Pukul : 09,00 WIB s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 76 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,23
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SEKTOR UNGGULAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2013-2014**

NAMA : April
NIM : 15 402 00245

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 27 Juli 2020

Dekan,



[Handwritten Signature]
Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si

NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : April

Nim : 15 402 00245

**Judul : Analisis Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017**

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki PDRB per kapita terendah di Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana klasifikasi pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sektor apa yang menjadi sektor basis dan non basis, dan sektor apa yang menjadi sektor potensi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi wilayah, sektor basis dan non basis, dan sektor potensi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, peneliti selanjutnya, dan bagi dunia akademik khususnya IAIN Padangsidimpuan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu ekonomi regional. Pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan analisis penentuan sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepannya. Analisis *Location Quotient* adalah salah satu teknik pengukuran untuk menentukan sektor basis dan non basis. Analisis *Shift Share* merupakan alat untuk membandingkan laju pertumbuhan sektor industri di daerah dengan wilayah nasional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis statistik deskriptif menggunakan studi *time series* dari tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013-2017*. Alat analisis yang digunakan yaitu, analisis *Location Quotient (LQ)*, dan analisis *Shift Share*.

Berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ)* diketahui bahwa sektor pertanian, konstruksi, administrasi, komunikasi, penyediaan akomodasi, kesehatan, dan pertambangan merupakan sektor basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil analisis *Shift Share* bahwa sektor yang memiliki potensi dan daya saing atau memiliki nilai positif pada komponen *Proportional Shift (P)* dan *Differential Shift (D)* adalah sektor konstruksi dan akomodasi.

Kata kunci: Sektor Unggulan, *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dengan judul **“Analsis Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017 ”**

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak

Dr. Anhar, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.Hi.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan sebagai pembimbing I. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Umum Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
3. Ibu Delima Sari Lubis S.E., M.Si sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Ibu Nurul Izzah M.Si Sebagai Plt. Sekretaris Program Studi, Serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Hamni Fadlillah Nasution, M.pd selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah ikhlas memberikan ilmu

pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Aliumar dan Ibunda Jalinur serta paman Syafri dan bibi Dra. Masni Lubis yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.
8. Untuk sahabat peneliti Nuraisyah Lubis (ica), Tapi Wardina Siregar (Utet), Reni Rahayu Dalimunthe (Entum), Alwi Swito, Muksin Fauzi, Beny Febriasah (Masben), Rusdan Syarif Jambak (Arif), Riyandi Azhar Pasaribu (Dilan) dan seluruh sahabat Ekonomi Syariah (ES-2) angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Rasa syukur yang tak terhingga peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, 2020

Peneliti,

April

NIM.15 40200245

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ◌◌---	Fathah	a	a
---- ◌◌--	Kasrah	i	i
-- ◌◌---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرد	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ-- َ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَّ-- َ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ → *kaifa* هَوْلَ → *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طلحة → *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة → *Raudah al-jannah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: ربنا → *rabbana* نعم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di depan, *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Kaerena keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT ACC SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Msalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Definisi Operasional Variabel.....	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitan.....	13
H. Sistematikan Pembhasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Pembangunan Ekonomi Rregional.....	16
2. Perencanaan Pembangunan	24
3. Pertumbuhan Ekonomi Regional	26
4. Toeri Basis Ekonomi	37
5. Sektor Unggulan dan Kritetia Penentu Sektor Unggulan.....	39
6. Analisis Penetuan Sektor Unggulan Prespektif Islam.....	40
7. Produk Domestik Regional Bruto	43
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
B. Jenis Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data	54
1. Analisis Location Quotient (LQ).....	54
2. Analisis Shift Share.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Deskripsi lokasi penelitian	59
1. Letak Geografis	59

2. Wilayah Administrasi.....	59
3. Demografi.....	60
4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan	62
B. Hasil Analisis Data.....	63
1. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	64
2. Hasil Analisis <i>Shift Share</i>	66
C. Pembahasan Per Sektor Kabupaten Pesisir Selatan	68
1. Sektor Pertanian	69
2. Sektor Pertambangan.....	70
3. Sektor Industri	70
4. Sektor Listrik dan Gas.....	71
5. Sektor Pengadaan Air.....	72
6. Sektor Kontruksi	73
7. Sektor Perdagangan Besar.....	74
8. Sektor Transportasi	75
9. Sektor Penyediaan Akomodasi.....	76
10. Sektor Informasi dan Komunikasi	77
11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	78
12. Sektor Real Estate	79
13. Sektor Jasa Perusahaan.....	80
14. Sektor Administrasi.....	81
15. Sektor Jasa Pendidikan.....	82
16. Sektor Jasa Kesehatan	83
17. Sektor Jasa Lainnya.....	84
D. Sektor Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan	85
E. Keterbatasan Penelitian	86
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat (Ribu Rupia)	4
Tabel 1.2	PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	5
Tabel 1.3	PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Kponstan Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah)	7
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)	8
Tabel 1.5	Distri busi Presentase PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	9
Tabel 1.6	Defenisis Operasional Variabel	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	45
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017	61
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Asta Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Persen)	62
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan <i>Location Quotient</i> Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017	65
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan <i>National Share, Propotional Shift, dan Differential Shift</i> Kabupaten Pesisir Selatan	68
Tabel 4.5	Hasil Analisis Sektor Pertanian	69
Tabel 4.6	Hasil Analisis Sektor Pertambangan	70
Tabel 4.7	Hasil Analisis Sektor Industri	71
Tabel 4.8	Hasil Analisis Sektor Listrik dan Gas	72
Tabel 4.9	Hasil Analsis Sektor Pengadaan Air	73
Tabel 4.10	Hasil Analsis Sektor Kontruksi	74
Tabel 4.11	Hasil Analisis Sektor Perdagangan Besar	75
Tabel 4.12	Hasil Analisis Sektor Transportasi	76
Tabel 4.13	Hasil Analisis Sektor Akomodasi	77
Tabel 4.14	Hasil Analisis Sektor Informasidan Komunikasi	78
Tabel 4.15	Hasil Analisis Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	79
Tabel 4.16	Hasil Analisis Sektor Real Estate	80
Tabel 4.17	Hasil Analisis Sektor Jasa Perusahaan	81
Tabel 4.18	Hasil Analisis Sektor Administrasi	82
Tabel 4.19	Hasil Analisis Sektor Jasa Pendidikan	83
Tabel 4.20	Hasil Analisis Sektor Jasa Kesehatan	84
Tabel 4.21	Hasil Analisis Sektor Jasa Lainnya	85
Tabel 4.22	Sektor Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017	85

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	51
Gambar 4.1	Hasi Perhitungan Location Quotient Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)**
- Lampiran 2 : PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)**
- Lampiran 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Persen)**
- Lmpiran 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Persen)**
- Lampiran 5 : Distribusi Presentase PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Persen)**
- Lampiran 6 : Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Persen)**
- Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Analisis LQ Tahun 2013**
- Lampiran 8 : Hasil Perhitungan Analisis LQ Tahun 2014**
- Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Analisis LQ Tahun 2015**
- Lampiran 10 : Hasil Perhitungan Analisis LQ Tahun 2016**
- Lampiran 11 : Hasil Perhitungan Analisis LQ Tahun 2017**
- Lampiran 12 : Hasil Perhitungan Analsis *Shift Share*, *Propotional Share*, *Differential Share***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian dalam satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya dari satu periode ke periode selanjutnya untuk menghasilkan barang dan jasa.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Investasi akan menambah barang, modal dan teknologi yang digunakan akan ikut berkembang. Di samping itu tenaga kerja akan bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk yang sesuai dengan pengalaman kerja dan tingkat pendidikan yang menambah keterampilan mereka.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Oleh sebab itu

untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan ialah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara riil yang dicapai.¹

Kemudian dengan itu maka faktor produksi juga akan mengalami peningkatan terhadap jumlah maupun kualitasnya sehingga dapat menambah jumlah barang, modal dan penggunaan teknologi dalam pengolahan sumber daya alam atau SDA akan mengalami peningkatan. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan bertambah sesuai dengan pengalaman kerja dan tingkat pendidikan yang menambah keterampilan penduduk sekitar.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian dari usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor primer yang berbasis pertanian menuju sektor tersier yang berbasis jasa.²

Pembangunan nasional selalu diarahkan pada pembangunan daerah. Berdasarkan UU 32 tahun 2004 pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dimana peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 241.

² Sharifuddin Husen, "Pengaruh Pengeluaran Anggaran Dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Dan Implementasinya Pada Kesejahteraan Sosial", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No. 1, Juni 2012, hlm. 3.

pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu sehingga upaya pemerataan pembangunan wilayah secara nasional.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya akan memberi kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah yang berdaya guna. Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu yang relatif lama, oleh karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun semakin mendekati pada tujuan nasional.

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian berganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Perbedaan kondisi di setiap daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Oleh karena itu penelitian yang mendasar tentang kondisi setiap daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna

dalam menyusun perencanaan pembangunan. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah bersangkutan.³

Berkaitan dengan pembangunan daerah, daerah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki PDRB per kapita terendah di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), 2013-2017

Kabupaten/kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	27,72	28,24	29,12	29,99	30,91
Pesisir Selatan	15,78	16,56	17,36	18,14	18,98
Solok	20,22	21,23	22,22	23,24	24,32
Sijunjung	23,03	23,97	24,89	25,76	26,67
Tanah Datar	20,82	21,96	23,07	24,17	25,34
Padang Pariaman	24,57	25,88	27,30	28,63	30,05
Agam	22,72	23,86	24,98	26,12	27,33
Lima Puluh Kota	22,54	23,65	24,73	25,80	26,92
Pasaman	17,28	18,09	18,84	19,59	20,38
Solok Selatan	19,03	19,77	20,45	21,11	21,81
Dharmasraya	25,99	26,84	27,59	28,30	29,06
Pasaman Barat	21,25	22,04	22,81	23,54	24,30
Kota					
Padang	35,42	37,17	38,98	40,84	42,82

³Fenti Putra Halawa, "Penentuan Sektor unggulan Kabupaten/kota di Kepulauan Nias", (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2014), hlm. 1-2.

Solok	32,32	33,59	34,90	36,25	37,63
Sawahlunto	33,95	35,63	37,41	39,17	41,01
Padang Panjang	37,13	38,86	40,61	42,28	44,17
Bukittinggi	36,57	38,11	39,75	41,45	43,24
Payakumbuh	25,40	26,61	27,78	29,02	30,33
Pariaman	31,30	32,79	34,24	35,74	37,34
Jumlah	25,18	26,37	27,57	28,77	30,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah selama kurun waktu 2013-2017. Sebagai penyandang gelar daerah termiskin di Sumatera Barat mestinya membuat pemerintah daerah Pesisir Selatan harus bekerja dengan lebih keras dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk itu diperlukan suatu strategi pengembangan sesuai dengan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

PDRB merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun seperti tabel berikut

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 (Ribuan Rupiah)

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3387,97	3797,81	4306,53	4641,33	5065,22
2	Pertambangan dan Penggalian	331,85	366,46	410,69	428,7	450,55
3	Industri Pengolahan	680,61	744,83	815,58	909,89	962,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,52	3,24	4,67	5,47	6,09
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,4	5,98	6,68	7,33	7,97
6	Konstruksi	766,67	855,29	979,64	1115,76	1280,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran	893,45	995,9	1143,23	1316,04	1522,57
8	Transportasi dan Pergudangan	293,22	335,06	365,5	409,52	456,29
9	Penyediaan Akomodasi	82,18	92,99	109,08	132,45	152,52
10	Informasi dan Komunikasi	484,08	526,5	550,72	612,91	718,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,31	208,91	232,37	257,39	273,08
12	Real Estate	109,66	126,38	141,34	155,38	170,15
13	Jasa Perusahaan	4,38	4,85	5,42	5,93	6,44
14	Administrasi Pemerintahan	558,16	578,84	597,71	669,28	750,61
15	Jasa Pendidikan	228,64	258,42	298,58	343,99	399,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104,22	116,57	124,61	136,1	153,84
17	Jasa Lainnya	86,12	95,65	104,73	125,33	144,67
	Produk Domestik Regional Bruto	8208,44	9113,69	10197,08	11272,8	12521,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.2 diatas diketahui bahwa jumlah PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 2013-2017

terus mengalami peningkatan secara nominal berdasarkan harga berlaku (Ribu Rupiah). Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar seperti tabel berikut.

Tabel 1.3
PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 (Ribu Rupiah)

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2797,6	2952,74	3116,57	3185,51	3286,24
2	Pertambangan dan Penggalian	272,89	283,48	296,63	313,6	322,92
3	Industri Pengolahan	613,71	652,49	681,3	726,92	740,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,18	2,43	2,54	2,8	2,95
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,16	5,37	5,6	5,95	6,2
6	Konstruksi	661,83	701,76	744,81	802,54	878,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran	817,24	888,87	941,56	1007,36	1088,2
8	Transportasi dan Pergudangan	250,61	272,28	294,01	319,56	347,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68,34	70,82	75,85	84,16	93,23
10	Informasi dan Komunikasi	448,39	475,11	515,86	566,21	627,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	162,64	167,16	173,52	185,01	188,72
12	Real Estate	98,77	104,64	110,7	117,14	123,25
13	Jasa Perusahaan	3,8	4,01	4,23	4,44	4,67
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan Sosial	441,95	447,41	462,3	486,3	511,3

15	Jasa Pendidikan	187,88	199,84	216,15	235,97	252,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,82	92,45	99,17	104,66	112,92
17	Jasa Lainnya	68,08	71,6	75,34	84,37	91,81
Produk Domestik Regional Bruto		5986,89	7392,46	7816,14	8232,5	8678,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2019

Berdasarkan tabel 1.3 di atas diketahui bahwa jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Pesisir selatan selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan secara nominal berdasarkan harga konstan (Ribu Rupiah). Peningkatan PDRB secara umum tersebut diikuti oleh peningkatan secara nominal dari sektor-sektor ekonominya.

Tabel 1.4
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2013-2017

Tahun	PDRB
2013	5,90
2014	5,80
2015	5,73
2016	5,33
2017	5,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.4 di atas laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami penurunan setiap tahunnya. PDRB tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,1 persen, tahun 2015 sebesar 0,3 persen, dan tahun 2016 sebesar 0,40 persen, kemudian tahun 2017 meningkat sebesar 0,11 persen.

Perkembangan distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2013-2017 Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,27	41,67	42,23	41,18	40,45
2	Pertambangan dan Penggalian	4,04	4,02	4,03	3,8	3,6
3	Industri Pengolahan	8,29	8,17	8	8,07	7,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
6	Konstruksi	9,34	9,38	9,61	9,9	10,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran	10,88	10,93	11,2	11,67	12,16
8	Transportasi dan Pergudangan	3,57	3,68	3,58	3,63	3,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1	1,01	1,07	1,17	1,22
10	Informasi dan Komunikasi	5,9	5,78	5,4	5,44	5,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,29	2,28	2,28	2,18
12	Real Estate	1,34	1,39	1,39	1,38	1,36
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan Sosial	6,8	6,35	5,86	5,94	6
15	Jasa Pendidikan	2,79	2,84	2,93	3,05	3,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,22	1,21	1,23
17	Jasa Lainnya	1,05	1,05	1,03	1,11	1,16
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.5 diatas selama kurun waktu 2013-2017 sektor yang paling dominan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB di

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Akan tetapi sektor ini mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2015 sebesar 42,23 persen, mengalami penurunan sebanyak 1,5 persen pada tahun 2016 menjadi 41,18 persen, bahkan di tahun 2017 juga mengalami penurunan sebanyak 0,73 persen menjadi 40,45 persen.

Oleh sebab itu, belum dapat ditentukan sektor mana yang merupakan sektor unggulan/potensial untuk dijadikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. Karena sektor yang memiliki kontribusi kecil sekalipun terhadap PDRB bisa saja setelah dianalisis ternyata bisa memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB tersebut. Untuk itu perlu dilakukan pengolahan data untuk menentukan kontribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan data yang ada maka peneliti perlu menjelaskan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian diantaranya:

1. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang memiliki PDRB per kapita terendah di Provinsi Sumatera Barat.

2. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari tahun 2013-2017 namun laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di tahun 2016.
3. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang memiliki nilai PDRB tertinggi di Kabupaten Pesisir Selatan namun distribusi persentasenya mengalami penurunan di tahun 2016-2017.
4. Perencanaan pembangunan yang efektif diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti berupaya untuk memfokuskan persoalan agar tidak meluas sehingga lebih fokus dan terarah. Adapun masalah yang akan dibahas yaitu: “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017”, wilayah yang diteliti yaitu Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Variabel penelitian perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis.⁴ Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

Tabel 1.6
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. ⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). 2. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). 3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK. 	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Sektor manakah yang menjadi sektor basis dan non basis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Sektor manakah yang menjadi sektor potensi unggulan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan?

⁵ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 18.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui sektor apa saja yang mejadi sektor potensi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berhungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Bagi Peneliti

Semoga peneliti dapat menerapkan pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, serta meningkatkan pengetahuan dalam masalah sosial ekonomi khususnya masalah yang berkaitan dengan Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Sektor Potensial Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentenag perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga bisa memberikan saran bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan denagan pmbangunan Kabupaten

Pesisir Selatan dalam rangka untuk mempersiapkan program pembangunan selanjutnya, terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sekor-sektor potensial yang ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya pada masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa IAIN Padangsidempuan khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan pembahasan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi 3 bagian. Peneliti mengklasifikasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang yang melatar belakangi masalah untuk diteliti. Masalah tersebut diidentifikasi kemudian dipilih menjadi beberapa poin sebagai batasan masalah dari identifikasi masalah yang ada.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini, seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan teori membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai variabel penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori.

Selanjutnya penelitian akan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki persamaan variabel. Dari teori tersebut akan digambar menjadi dalam bentuk kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, didalamnya memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi lokasi penelitian, analisis data, penentuan sektor unggulan, dan keterbatasan penelitian.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembangunan Ekonomi Regional

a. Pengertian Pembangunan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.⁶

Defenisi berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayah termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi.⁷

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁸

⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3.

⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 132.

⁸ *Ibid*, hlm. 133.

Perkembangan dari pembangunan ekonomi diharapkan dapat menambah kesempatan kerja, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi. Proses pembangunan ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap perubahan perekonomian, serta mengurangi kemiskinan, pengangguran yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi berupa proses yang bertujuan untuk mencapai perubahan yang terjadi secara terus menerus dalam usaha memperbaiki pendapatan masyarakat.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau regional.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi yang diwujudkan dari berbagai kebijaksanaan, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut.⁹

- a) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan produksi nasional yang tepat.
- b) Mencapai tingkat kestabilan harga dengan mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi diperekonomian.

⁹ Sirojuzilam dan Kasyful Mahali, *Regional Pembangunan, Perencanaan Dan Ekonomi* (Medan USU Pers, 2010), hlm. 6.

- c) Mengatasi masalah pengangguran dan membuka kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja.
- d) Mewujudkan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata.

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakat harus mampu memperkirakan dan menggunakan potensi daerahnya secara tepat agar rancangan yang dilakukan untuk membangun perekonomian daerah sesuai dengan kondisi daerahnya.

Dalam pembangunan daerah ada 4 peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu:¹⁰

- a) *Entrepreneur*, dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah.
- b) Koordinator, pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan

¹⁰ Subandi, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya.

- c) Fasilitator, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya.
- d) Simulator, pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulant dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk kedaerah tersebut.

Peran Pemerintah semakin besar dalam membentuk keberhasilan pembangunan daerah maka kebijakan-kebijakan yang tepat dan terencana akan mengakibatkan pembangunan daerah terlaksana dengan cepat dan tepat. Terdapat dua prinsip dalam pembangunan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan yaitu mengenali ekonomi wilayah dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.¹¹

b. Tahapan Pembangunan Ekonomi Regional

Tahapan-tahapan pada pembangunan ekonomi regional sebagai berikut:¹²

¹¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Prinsip dasar Pembangunan Daerah*, <https://www.bappenas.go.id>, diakses 30 April 2019 pukul 10:10 WIB.

¹² Sirojuzilam, *Pembangunan Ekonomi Regional* (Medan: USU Perss, 2015), hlm. 19.

- a) Mempelajari terlebih dahulu karakteristik daerah yang akan dibangun, misalnya jumlah jenis serta kondisi sumber daya alam yang ada dan keadaan pasar, sosial, ekonomi makro (tingkat pendapatan), dan struktur politiknya.
- b) Menentukan komoditas dan sektor unggulan dan jenis kegiatan ekonomi yang perlu dikembangkan, baik yang sudah ada sejak lama maupun yang belum ada.
- c) Menentukan sifat serta mekanisme keterkaitan antara sektor-sektor yang ada di daerah tersebut serta mempelajari kelembagaan sosial masyarakat.

c. Pembangunan Ekonomi Prespektif Islam

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya.¹³ Menurut paradigma Islam, ada lima pondasi filosofis yang menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Tauhid Uluhiyyah* yaitu percaya bahwasanya tiada tuhan selain Allah Swt. dan semua yang ada di alam semesta hanya keepunyaan-Nya. Manusia hanya penerima amanat atas segala

¹³ Almizan, Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif Islam, dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, No 2, Juli-Desember 2016, hlm. 17-18.

¹⁴ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 22-24.

sumber daya yang disediakan kepadanya dan mengupayakan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kemaslahatan ummat. Sebagaimana firman Allah di bawah ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15)¹⁵

Berdasarkan ayat Al-qur'an diatas menjelaskan tentang Allah telah menciptakan bumi agar manusia dapat dengan mudah memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Terdiri dari lautan, daratan, dan ruang angkasa semua itu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia.¹⁶

- 2) *Tauhid Rubuhiyyah*, yaitu percaya bahwa Allah sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan memelihara seluruh ciptaan-Nya. Dalam konteks ini manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya tergantung pada upaya sendiri, tetapi juga pertolongan dari Allah Swt.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al -Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 449.

¹⁶ Oermar Bakry, *Tafsir Rahmat* (Jakarta: Mutiara, 1972), hlm. 1147.

- 3) *Khalifah*, dalam konteks ini posisi manusia dimuka bumi adalah sebagai wakil Allah yaitu manusia sebagai pelaku dalam pembangunan. Senantiasa harus taat kepada peraturan-perturan yang telah Allah tetapkan dan jangan melampaui batas sehingga kelestarian sumber daya tetap terjaga. Sebagaimana firman Allah berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah: 30).¹⁷

Berdasarkan ayat Al-qur'an di atas menjelaskan tentang kedudukan manusia dimuka bumi, menerangkan persoalan Nabi Adam diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat kuatir akan kesanggupan Adam karena padanya ada hawa nafsu yang mendorong berbuat kerusakan. Malaikat merasa lebih suci dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

pada akhirnya Allah menguji siapa yang lebih pintar yang ternyata dimenangkan oleh Adam. Allah menyuruh Malaikat tunduk member hormat kepada Adam. Malaikat menaati perintah Allah.¹⁸

- 4) *Tazkiyyah an-nas*, ini mengarah kepada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Dengan kata lain manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (*agen of change and development*). Oleh sebab itu, setiap perubahan dan pembangunan apapun sebagai akibat upaya yang dilakukan oleh manusia ditunjukkan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.
- 5) *Al-Falah*, yaitu konsep keberhasilan, dalam islam keberhasilan apapun yang dicapai di kehidupan dunia akan memengaruhi keberhasilan diakhirat sepanjang tidak menyalahi petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sehingga tidak ada dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia atau persiapan di kehidupan akhirat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam Islam. Karena, etika, moral, dan spiritual merupakan faktor

¹⁸ Oemar Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 15

pembentuk kualitas pertumbuhan yang akan dicapai. Sebagaimana firman Allah berikut:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud: 61).¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah dijadikan manusia penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.²⁰

2. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa perencanaan karena masalah yang terpenting menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber daya pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan (ekonomi dan sosial) yang lebih baik

¹⁹ Depatemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 228.

²⁰ Oemar Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 45.

secara efektif dan efisien.²¹ Secara umum perencanaan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan laju pertumbuhan variabel-variabel ekonomi kelompok.

Banyak literatur menyebutkan bahwa perencanaan regional menyangkut ke dalam dua aspek utama yaitu sesuatu yang menyangkut ruang dan aktivitas di atas ruang tersebut. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Maka tidak ada lagi strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pegambil keputusan publik guna mewujudkan kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut

²¹ Raharjo Adismsta, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 200

adalah mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.²²

3. Pertumbuhan Ekonomi Regional

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi (*production-possibility frontier/PPF*) bangsa bergeser keluar.²³

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional dapat disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK), dimana PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.²⁴

Pertumbuhan ekonomi regional adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.

²² Fitri Amalia, "Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB", dalam *Jurnal Ekonomi* Vol. 11 No. 2, 2012, hlm. 68.

²³ Samuelson dan Nerdhaus, *Ilmu Makro Ekonomki* (Jakarta: PT. Media Edukasi, 2004), hlm. 249.

²⁴ Spriadi Hasbiullah, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba", dalam jurnal *Iqtisaduna*, Volume 1, No.1, Juni 2015, hlm. 74.

Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga belaku. Agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai real, yaitu dalam haraga konstan. Menurut Boediono “Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang “. ²⁵ Jadi, presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang dan akan berlanjut dan bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. ²⁶

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pola pertumbuhan ekonomi regional tidakalah sama dengan apa yang lazim ditemukan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, kedua kelompok ilmu ini juga mempunyai ciri yang sama, yaitu memberikan tekanan pula pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah beberapa teori pertumbuhan ekonomi regional yang lazim dikenal, yaitu: ²⁷

- 1) Model *Export Base*, model ini mendasarkan pandangannya dari sudut teori lokasi, yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi dan dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah

²⁵ Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, hlm. 9

²⁶ Robinson Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 46.

²⁷ Sirojuzilam, *Op. Cit.*, hlm. 15.

ditentukan oleh eksplotasi kemanfaatn alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan yang juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari daerah-daerah lain.

- 2) Model *Neo- Classic*, model ini mendasarkan analisisnya pada peralatan fungsi produksi. Dalam model ini disebutkan bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah tenaga kerja dan modal. Ke khususnya dari teori ini adalah pembahasan secara mendalam tentang pengaruh perpindahan penduduk (migrasi) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Maka kesimpulan dari model ini adalah bahwa terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah (*regional disparity*) pada negara yang bersangkutan.
- 3) Model *Cumulatif Causation*, teori ini berpendapat bahwa pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar (*market mechanism*, tapi perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan regional, terutama untuk daerah-daerah yang relatif masih terbelakang.
- 4) Model *Core Peripheri*, teori ini menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*core*) dan desa (*periphery*). Menurut teori ini, gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak

ditentukan oleh keadaan desa-desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan juga sangat ditentukan oleh arah pembangunan perkotaan.

c. Pertumbuhan Ekonomi Prespektif Islam

Perhatian islam terhadap pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah mendahului sistem kapitalisme atau marxisme yang berkembang di Barat. Hal ini terbukti dengan berbagai hasil karya tentang ekonomi dunia dalam pertumbuhan ekonomi merupakan hasil karya dari kaum Muslim yang jauh mendahului karya-karya Barat. Contohnya yaitu, Ibnu Khaldun yang telah menyinggung terminologi pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah* dalam bab tentang Perdaban dan Cara Mewujudkannya, Kemudian kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf membahas tentang pertumbuhan ekonomi, dimana ia menetapkan saran bagi khalifah Harun al-Rasyid untuk mengatur pajak.

Dilihat daritujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Di sisi lain, Islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan jumlah komoditas yang diperlukan dalam tingkat berimbang untuk mendapatkannya.²⁸ Tingkat Pertumbuhan berasal dari

²⁸ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2015), hlm. 125.

tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi.²⁹

Perkenaan dalam pertumbuhan ekonomi menurut ilmu islam, terletak pada firman Allah dalam surah Al- Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Al-Hasyr:7).

Berdasarkan ayat Al-qur’an di atas menjelaskan tentang pembagian harta rampasan. Sebagaimana yang dimaksud dengan ayat di atas yaitu pembagian harta rampasan hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya serta hendaklah diserahkan kepada yang telah ditentukan. Yaitu sebagai berikut: harta rampasan diserahkan untuk

²⁹ Sirojuzilam, *Op. Cit.*, hlm. 52.

Rasul dan kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan (musafir). Pembagian demikian ditentukan agar jangan sampai harta rampasan itu jatuh ke tangan orang-orang kaya.³⁰

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:³¹

1) Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang.

2) Jumlah penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara menambah produksi. hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan selanjutnya akan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Karena bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk, maka luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi.

3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi

³⁰ Oemar Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 1101.

³¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 429-433.

Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi jika teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan tercapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Maka tanpa adanya perkembangan teknologi produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah.

4) Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Sedangkan menurut Eka Pratiwi juga sama akan tetapi terdapat penambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:³²

- a) Faktor sumber daya manusia, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung sejauh mana sumber daya manusia hanya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

³²Eka Pratiwi Lumban Toruan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2, No. 2, 2011, hlm. 16.

b) Faktor budaya, faktor budaya dapat berfungsi sebagai pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

d. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Prespektif Islam

Uraian mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi islam sebagai berikut:³³

1) Serba Meliputi.

Islam berada dalam posisi lebih utama di mana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang sempurna dari semua aspek. Karena islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.

2) Berimbang.

Pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi, namun ditujukan beralndaskan keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah QS.

Al-maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوْا

³³ Nurul Huda dkk, *Op. Cit.*, hlm. 126-127.

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah Ayat 8)³⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang keadilan karena Allah maha mengetahui dan selalu menyasikan setiap aktivitas manusia di muka bumi. Keadilan harus ditegakkan, permusuhan dan segala perbedaan pedapat dengan orang lain tidak boleh menjadi alasan berbuat menurutkan emosi yang menyimpang dari jalan lurus yang adil terhadap siapa saja. Hukum harus dintegakkan dengan adil kepada siapapun, barang siapa yang menegakkan keadilan berarti dia bertakwa kepada Allah.³⁵

3) Realistis.

Realistis adalah sautu pandangan terhadap permasalahan sesuai kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi yang juga realistis.

³⁴ Departemen Agama RI

³⁵ Oemar Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 529.

4) Keadilan

Islam dalam menegakkan hukum- hukumnya di dasrakan atas landasan keadialan diatara manusia. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam firman Allah Qs.*An-Nahl* ayat 90 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat Al-qur'an diatas menjelaskan tentang budi-pekerti merupakan sendi dari keselamatan dunia dan akhirat. Adil berarti memberikan hak yang sempurna kepada setiap orang tanpa pandang bulu, berbuat kebaikan kepada seseorang yang lebih dari haknya, dan memberi bantuan kepada kaum kerabat yang memerlukan bantuan. Dilarang melakukan perbuatan keji, mungkar, memusuhi dan menganiaya, dan melanggar janji.³⁶

5) Bertanggung jawab

³⁶ *Ibid*, hlm. 529.

Tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting dalam syariat islam. Jika mengikuti syariat islam, maka disimpulkan bahwa adanya tanggung jawab ada dua sisi yaitu, tanggung jawab antara sebagian anggota masyarakat dan sebagian golongan lainnya dan tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya.

6) Mencukupi

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat manusia.

7) Berfokus pada Manusia

Karakter ini sesuai dengan posisi manusia yang merupakan duta Allah dimuka bumi dan inilah yang mencirikan tujuan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam islam.

e. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat³⁷

Teori Pertumbuhan jalur cepat (*Turnpike*). Pada intinya, teori ini mendasarkan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar.

³⁷ Robinson Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 54

Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar negeri (produk tersebut harus bisa di ekspor). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh

4. Teori Basis Ekonomi

Dalam konteks ekonomi regional, terdapat berbagai teori yang merupakan pertumbuhan regional atau perubahan-perubahan kondisi perekonomian suatu daerah. Salah satu konsep yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan regional adalah teori basis ekonomi.

Teori basis ekonomi (*Economic base theory*) adalah suatu teori atau pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.³⁸

Inti dari teori basis ekonomi adalah proporsinya yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah pada akhirnya tergantung kepada permintaan (*demand*) dari luar terhadap produknya. Tingkat perkembangan suatu daerah ditentukan oleh aktivitas basisnya sebagai pengeksport terhadap daerah-daerah lain. Teori basis ekonomi menjelaskan tentang pentingnya basis ekspor sebagai faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

³⁸ Sirojuzilam, *Op. Cit.*, hlm. 91.

Menurut teori basis ekonomi dapat berfungsi untuk melihat peranan suatu sektor di dalam perekonomian suatu daerah, baik dalam efek tenaga kerja maupun efek pendapatan, yaitu dengan cara menentukan apakah sektor itu merupakan sektor basis atau bukan. Aktivitas sektor basis yang mampu secara luas menjual produknya baik di dalam maupun diluar daerah akan mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut dan menentukan pembangunan menyeluruh bagi daerah tersebut termasuk peningkatan kesempatan kerja yang berpengaruh pada pendapatan regional. Aktivitas sektor non basis merupakan sektor sekunder yang artinya tergantung kepada perkembangan yang terjadi pada sektor basis yang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada konsumsi dan investasi di daerah.³⁹

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam memilih antara kegiatan basis dan nonbasis.⁴⁰

- 1) Metode langsung dapat dilakukan dengan cara survei secara langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang di produksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebuuthan untuk menghasilkan produk tersebut.
- 2) Metode tidak lansung adalah dengan meenggunakan asumsi atau disebut dengan metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan kondisi wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan

³⁹Anna Yulita, "Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Kemiring Ilir", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume. 7, No. 2, Desember 2009, hlm. 10.

⁴⁰M. Iqbal, dkk., *Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kabupaten Lamongan* (jurnal Unesa), hlm. 4.

tertentu yang di asumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan nonbasis.

- 3) Gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung disebut metode campuran.
- 4) Metode *Location Quetien* (LQ) membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah atau sektor tertentu di wilayah dibandingkan dengan sektor yang sama secara nasional.

5. Sektor Unggulan dan Kriteria Penentu Sektor Unggulan

a. Pengertian Sektor Unggulan

Sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.⁴¹

Sektor unggulan adalah sektor yang dikembangkan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan tersebut bahkan hanya mampu untuk memenuhi permintaan dalam daerahnya sendiri tetapi juga mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerahnya.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20.

b. Kriteria Penentu Sektor Unggulan

Menurut Rachbini dalam dalam Fachrurrazy ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu:⁴²

- a) Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
- b) Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
- c) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik pemerintah maupun swasta.
- d) Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

6. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Prespektif Islam

PDRB merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi, dan sektor unggulan. Setiap daerah mempunyai sumber daya alam dan PDRB yang tidak sama dengan daerah lainnya. Oleh karena itu penentuan sektor unggulan menjadi hal yang paling penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era ekonomi daerah saat ini. Otonomi daerah telah memberikan kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi

⁴²Fachrurrazy, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB", (Tesis, USU , 2009), hlm. 36.

sumber daya yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Bicara mengenai mengenai sumber daya, berarti bicara mengenai nikmat Allah yang telah di anugerahkan kepada manusia mencakup seluruh sumber daya yang ada di bumi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 20.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَٰ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. (QS. Al-Hijr: 20)⁴³

Ayat diatas menjelaskan tentang Allah yang menciptakan bumi dengan gunung-gunung yang tinggi menjulang, laut yang luas lepas, padang-padangnya yang terbentang lebar. Segala sesuatu itu diciptakan Allah dengan ukuran tertentu demikian harmonisnya: manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.⁴⁴

Ajaran Islam memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk mengelola dan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Termasuk juga pengembangan sektor-sektor unggulan yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Pada dasarnya peran pemerintah dalam perekonomian yang islami, memiliki dasar rasional yang kokoh.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), hlm. 263.

⁴⁴ Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat* (Jakarta: Mutiara, 1972), hlm. 503.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang dalam Al-quran dan Sunnah baik secara eksplisit maupun implisit.⁴⁵

Kemampuan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dijadikan sebagai sektor unggulan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam konteks islam tidak hanya terjadinya pertumbuhan ekonomi secara umum, namun lebih di utamakan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki antar daerah dapat mendorong suatu daerah untuk menolong daerah lain sebagai pemasok sektor-sektor tertentu yang tidak dapat dihasilkan daerah tersebut, dan sebaliknya. Sebagaimana firman Allah telah menganjurkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah tentang tolong menolong.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al- Maidah: 2)⁴⁶

⁴⁵ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 446.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 106.

Ayat di atas menjelaskan tentang hidup rukun damai, tolong-menolong dalam kebaikan, tidak bermusuhan, dan mengadakan komplotan untuk melakukan pekerjaan di tutup dengan perintah bertakwa kepada Allah, mengerjakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan pemikiran ekonomi tokoh ekonomi Islam yaitu Al- Syaibani pada poin ke lima tentang spesialisasi dan distribusi pekerjaan dan Al-Gahzali mengakui tentang perihal kompetitif yang dimiliki oleh suatu lingkungan ketika aktivitas ekonomi berlangsung.⁴⁸

Al-syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain, karena seseorang tidak akan bisa menguasai semua ilmu pengetahuan sepanjang hidupnya, dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya. Oleh karena itu Allah Swt. member kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjalankan aktivitas ibadah kepada-Nya.

Oleh karena itu penentuan sektor unggulan menjadi salah satu akses yang dapat mempererat hubungan kemasyarakatan antara satu daerah dengan daerah lain di sekitarnya.

7. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan wilayah

⁴⁷ Oemar Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 201.

⁴⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 262-263.

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam satu periode tertentu apakah faktor produksi yang dimiliki.⁴⁹

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung menggunakan tiga pendekatan yaitu:⁵⁰

1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung berdasarkan akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun).

2) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB menurut pendekatan ini, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

3) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Menurut pendekatan ini PDRB adalah semua komponen pengeluaran efektif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah pembentukan modal

⁴⁹ “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017”, ©Badan Pusat sataistik, No.9302021.1302, Kabupaten Pesisir selatan, CV. Adyta, hlm. 4.

⁵⁰ Dodik Surya, “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Ngawi”, (Thesis, PPs UNS Surakart, 2012), hlm. 37-38.

tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor *netto* dalam jangka waktu tertentu.

I. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah banyak penelitian tentang penentuan sektor unggulan perekonomian wilayah. Keseluruhan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Alat Analisis	Hasil penelitian
1.	Ahmad Rizani ⁵¹	Analisis <i>Shift Share, Location Quotient (LQ)</i> .	Berdasarkan analisis LQ sektor unggulan di kabupaten Jember yaitu sektor Pertanian, Perburuan dan jasa pertanian dan subsektor tanaman perkebunan. Hasil analisis Shift Share sektor dan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan bernilai positif.
2.	Bambang Kurniawa ⁵²	Analisis <i>Location Quotient, Analisis Shift Share</i>	Sektor pertanian dan jasa-jasa merupakan basis yang dapat menjadi pendorong sektor-sektor lainnya di kabupaten Kerinci. Berdasarkan Shift share sektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan konstruksi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, serta sektor hotel dan restoran yang prospektif untuk dikembangkan.
3.	Ekaristi Jekna	Analisis <i>Location</i>	Sektor pertambangan, pertanian, konstruksi, dan industri

⁵¹ Ahmad Rizani, "Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Subsektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan di Kabupaten Jember", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, hlm. 137.

⁵² Bambang Kurniawan, "Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari- Juni 2016, hlm. 23.

	Mangilaleng, dkk ⁵³	<i>Quotient</i> . Analisis <i>Shift Share</i> .	merupakan sektor basis di kabupaten Minahasa Selatan. Sektor yang memberikan daya saing terbesar yaitu sektor pertanian, industri, dan konstruksi.
4.	Sapriadi Hasbiullah ⁵⁴	Analisis <i>Location</i> <i>Quotient</i> . Analisis <i>Shift Share</i> .	Berdasarkan hasil analisis LQ dan Shift Share sektor jasa-jasa merupakan sektor basis dan kompetitif di Kabupaten Bulukumba
5.	Fitri Amalia ⁵⁵	Analisis <i>Location</i> <i>Quotient</i> , Analisis <i>Shift Share</i> .	Sektor industri merupakan sektor basis yang memiliki indeks terbesar di Kabupaten Bone Bolango. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor kompetitif di kabupaten Bone Bolango.
6.	Saedah Afri tanjung ⁵⁶	Analisis <i>Location</i> <i>Quotient</i> , Analisis <i>Shift Shar</i> .	Sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan serta sektor perindustrian merupakan sektor basis. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor yang mempunyai daya saing di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
7.	Usanatul Hasanah ⁵⁷	Analisis <i>Location</i> <i>Quotient</i> , Analisis <i>Shift Share</i> , <i>dan Tipology</i>	Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga analisis menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong dalam sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, sektor

⁵³ Ekaristi Jekna Mengilaleng, dkk, "Analisis Sektor Unggulan Minahasa Selatan", dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 04, 2015.

⁵⁴ Spariadi Hasbiullah, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁵⁵ Fitri Amalia, *Op. Cit.*, hlm. 205.

⁵⁶ Saedah Afri Tanjung, "Penentuan sektor Unggulan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 2013-2015 Dengan Pendekatan *Location Quotient* dan *Shift Share*", (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017), hlm 71.

⁵⁷ Usanatul Hasanah, "Penentuan Subsektor Unggulan Pembentuk PDRB Di Seluruh Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2010", (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017), hlm. 79.

		<i>Klassen.</i>	basis dan kompetitif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sebagian dari sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sub sektor tanam pangan dan sub sektor jasa pertanian dan perburuan.
8.	Putri Melati Adela ⁵⁸	Analisis <i>Location Quotient</i> , Analisis <i>Shift Share</i> .	Berdasarkan gabungan hasil analisis <i>Tipology Klassen</i> , <i>Location Quotient</i> , dan <i>Shift Share</i> maka yang merupakan sektor unggulan di Kota Padangsidempuan yang memenuhi kriteria sebagai sektor maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis, dan memiliki daya saing adalah sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan.
9.	Fachrurrazy ⁵⁹	Analisis <i>Location Quotient</i> . <i>Tipology Klassen</i> . <i>Shift Share</i> .	Sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis. Sektor pertanian, dan sektor pengangkutan, komunikasi merupakan sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Sektor pertanian, bangunan, dan konstruksi, dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan sektor yang kompetitif.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persamaan penelitian Ahmad Rizani terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient*, dan *Shift Share*. Perbedaannya

⁵⁸ Putri Melati Adela, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kota Padangsidempuan tahun 2008-2013", (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2016), hlm. 100.

⁵⁹ Fachrurrazy, *Op. Cit.*, hlm. 99.

terletak pada lokasi penelitian, Ahmad Rizani melakukan penelitian di Kabupaten Jember sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Persamaan penelitian Bambang Kurniawan terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient*, dan *Shift Share*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian Sapriadi Habiullah melakukan penelitian di Kabupaten Kerinci sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Persamaan penelitian Ekaristi Jekna Mangilaleng, dkk terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient*, dan *Shift Share*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Ekaristi Jekna Mangilaleng, dkk melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Persamaan penelitian Sapriadi Hasbiullah terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient*, dan *Shift Share*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian Sapriadi Hasbiullah melakukan penelitian di Kabupaten Bulukumba sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Persamaan dengan penelitian Fitri Amalia terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Perbedaan terletak pada lokasi penelitiannya, Fitri Amalia melakukan penelitian, Fitri Amalia melakukan penelitian di Kabupaten Bone Balango sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Persamaan dengan penelitian Saedah Afri tanjung terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* dan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, lokasi Saedah Afri di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir selatan.

Persamaan penelitian Usnatul Hasanah terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Usnatul hasanah melakukan penelitian di seluruh Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Persamaan penelitian Putri Melati Adela terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Putri Melati Adela melakukan penelitian di Kota Padangsidimpuan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir selatan.

Persamaan penelitian Fachrurrazy terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient*, dan *Shift Share*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Fachrurrazy melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Utara, Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan.

J. Kerangka Pikir

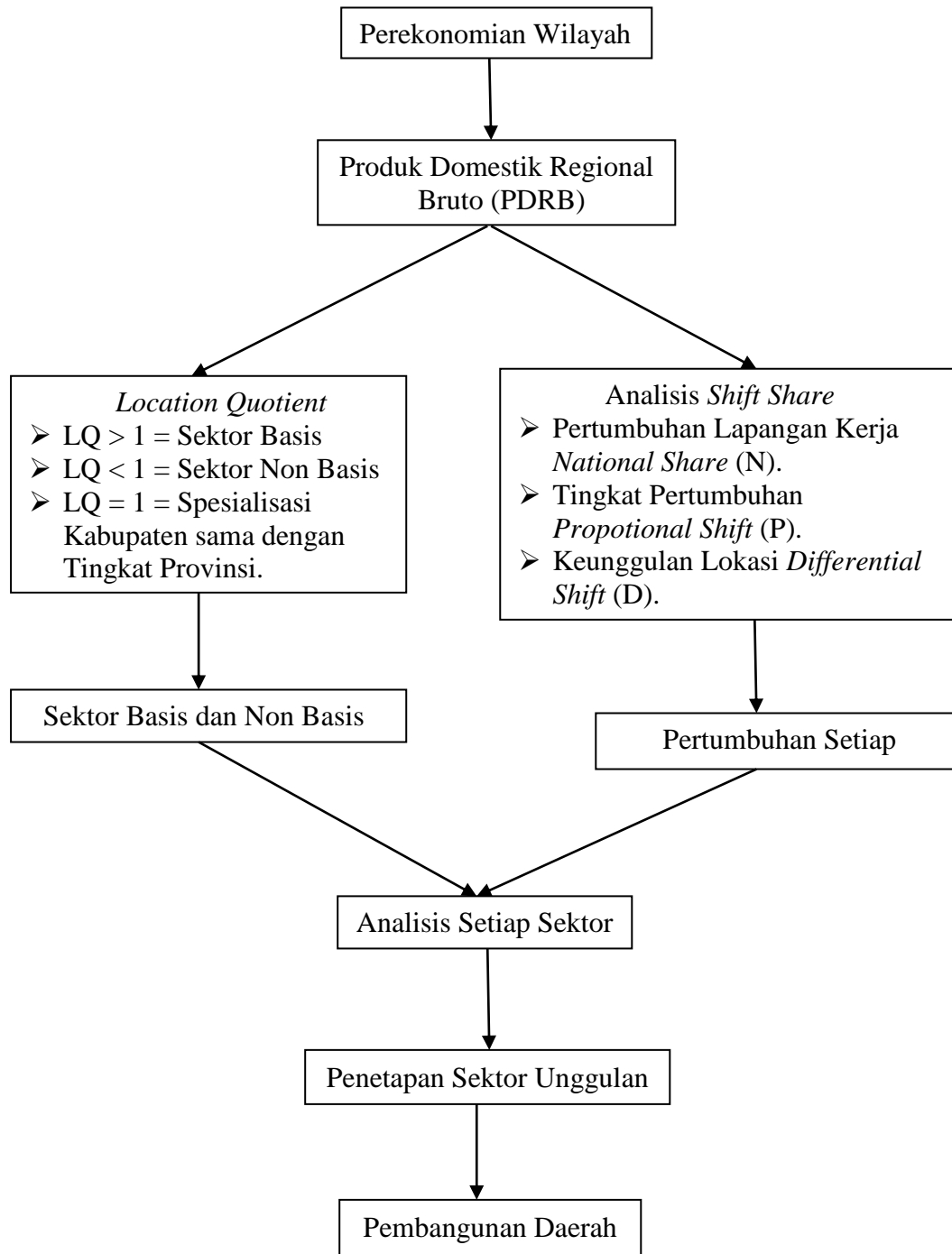
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu adalah data *Produk Domestik Regional*

Bruto (PDRB). PDRB suatu wilayah dapat menggambarkan peranan sektor ekonomi dan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendapatan PDRB merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian, sektor basis dan nonbasis, dan sektor unggulan dengan menggunakan alat analisis ekonomi regional, yaitu, *Location Quotient*, dan *Shift Share*.

Dengan mengetahui sektor basis dan nonbasis, dan sektor unggulan maka bisa dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut.

Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral, keberhasilan dapat dari kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu strategi pembangunan di upayakan untuk menggali potensi yang ada agar dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan di daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data dari *Badan Pusat Statistik* (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat dengan rentang waktu 2013-2017. Penelitian ini dilakukan mulai Agustus 2019 sampai Maret 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis statistik deskriptif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶⁰ Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶¹ Penelitian ini menggunakan data studi literatur tentang analisis penentuan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini menggunakan studi *time series* dari tahun 2013-2017. Pengolahan data menggunakan metode analisis *shift share*, dan analisis *Location Quotient*. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan *Ms. Excel*.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 13.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 142.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.⁶² Populasi dari penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat atas dasar harga konstan (ADHK) , Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat (ADHK), Distribusi PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat (ADHB) tahun 2013-2017.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶³ Teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu purposive sampling atau disebut juga dengan *judgmental sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel.⁶⁴

Adapun kriteria dalam pengumpulan sampel yaitu data yang digunakan tersedia dan terpublikasi di website *Badan Pusat Statistik (BPS)* Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Utara melalui situs www.bps.go.id. Sampel dalam penelitian ini yaitu PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat ADHK tahun 2013-2017.

⁶² Morisan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

⁶³ Sugiyono, *Op, Cit.*, hlm. 116.

⁶⁴ Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dari sumber-sumber telah ada dalam bentuk laporan yang sudah dipublikasikan.⁶⁵ Data yang di himpun adalah PDRB Pesisir Selatan dan PDRB Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2017 yang diperoleh dari data terpublikasi di website *Badan Pusat Statistik* (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat yaitu melalui referensi sumber pustaka dari berbagai sumber, seperti publikasi situs *www.bps.go.id*.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Analisis *Location Quotion*

Location Quotient digunakan untuk mengukur relative derajat spesialisasi suatu industri (kelompok industri) yang dimiliki oleh suatu wilayah dibandingkan dngan wilayah lainnya. Adapun yang digunakan sebagai pembanding biasanya adalah wilayah yang lebih luas atau bahkan setingkat nasional.⁶⁶

Metode *location quotient* (LQ) adalah salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis dan nonnbasis. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sector-sektor basis suatu wilayah

⁶⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19.

⁶⁶ Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 51.

dengan menggunakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Rumusnya adalah sebagai berikut:⁶⁷

$$LQ = (x_i / \text{PDRB}) / (X_i / \text{PNB})$$

Dimana:

x_i : Nilai tambah sektor i Kabupaten

Pesisir Selatan

PDRB : Total PDRB Pesisir Selatan Pada
tahun tertentu

X_i : Nilai tambah Sektor i Provinsi

Sumatera Barat

PNB : Total PDRB Provinsi Sumatera

Barat pada tahun tertentu

Berdasarkan persamaan diatas ada tiga kemungkinan LQ yang akan terjadi, yaitu:⁶⁸

- a. Jika $LQ > 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis artinya tingkat spesialisasi kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan sudah melebihi kebutuhan konsumsi di daerah dimana komoditas tersebut dihasilkan dan kelebihanannya dapat dijual keluar daerah (ekspor).
- b. Jika $LQ = 1$ maka tingkat spesialisasi kabupaten sama dengan tingkat provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk kebutuhan daerah setempat karena belum mampu mencukupi

⁶⁷ Robinson tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁶⁸ Aditiya Nugraha Putra, "Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Yogyakarta", (Skripsi, UN Syarifhidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 34-35.

kebutuhan konsumsi di daerah berangkutan dan pemenuhannya didatangkan dari tingkat provinsi.

- c. Jika $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasi kabupaten lebih rendah dari tingkat provinsi.

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift-Share* merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Analisis *Shift-Share* merupakan model pertumbuhan ekonomi wilayah dalam mengidentifikasi peran ekonomi nasional dan kekhususan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan.⁶⁹ Analisis *Shift Share* merupakan alat untuk membandingkan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah dengan wilayah nasional.⁷⁰

Perbedaan metode ini dengan LQ yaitu LQ tidak memberikan penjelasan tentang faktor penyebab perubahan struktur industri yang terjadi sedangkan analisis *Shift Share* menjelaskan secara rinci penyebab perubahan atas struktur industri yang diteliti. Analisis *Shift Share* menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya.

⁶⁹ Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), hlm. 96.

⁷⁰ Robinson Tarigan, *Op Cit*, hlm. 85.

Data yang digunakan dalam analisis *Shift Share* ini adalah PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013-2017 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010. Melalui analisis *Shift Share* ada tiga informasi dasar yang dapat diketahui, dimana ketiga komponen tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya yaitu:⁷¹

a. Komponen *National Share* (N_s)

Komponen *national share* adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Komponen *shift* adalah penyimpangan dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional.

Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negative di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. *Shift netto* terbagi menjadi dua komponen yaitu *propotional shift* dan *differential shift*.

Rumus perhitungan *National Share* adalah:⁷²

$$N = \{ [E_{r,i,t-n} \times E_{N,t} / E_{N,t-n}] - E_{r,i,t-n} \}$$

b. Komponen *Propotional Shift* (P)

Propotional shift merupakan komponen struktural, mengukur besarnya *shift regional netto* yang di sebabkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di

⁷¹ *Ibid*, hlm. 86-87.

⁷² *Ibid*, hlm. 88.

daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan merosot.

Rumus perhitungan *Propotional Shift* adalah:

$$P = \{E_{r,i,t-n} \times [(E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n})]\}$$

c. Komponen *Differential Shift (D)*

Differential shift dinamakan komponen lokasional atau regional, mengukur besarnya *shift regional netto* yang disebabkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern.

Rumus perhitungan *Differential Shift* adalah:

$$D = \{E_{r,i,t} - [(E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) \times (E_{r,i,t-n})]\}$$

Dimana:

- N : Wilayah nasional (Provinsi)
- r : Wilayah analisis (Kabupaten/kota)
- E : Jumlah lapangan kerja
- I : Sektor industri
- t : Tahun
- t-n : Tahun awal
- Ns : *Nationnal Share*
- P : *Propotional Sahare*
- D : *Differential Share*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Pesisir Selatan

1. Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada $0^{\circ} 59' - 2^{\circ} 28, 18'$ LS dan $100^{\circ} 19' - 101^{\circ} 18'$ BT. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pesisir selatan terletak di pantai barat pulau Sumatera dengan luas wilayah mencapai $5749,89 \text{ km}^2$ dengan ketinggian yaitu 0 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada garis khatulistiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Padang.
- b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- c. Sebelah Timur : Bertbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Prvinsi Jambi.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudra Indonesia.

2. Wilayah Administrasi

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan secara administrasi terdiri atas 15 Kecamatan, 182 Nagari, memiliki 47 pulau kecil yang menyebar di seluruh sisi pantai Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut adalah penjabaran 15 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: Kecamatan Silaut, Lunang Basa, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal, Airpura, Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang, Sutera, Batang Kapas, IV Jurai, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Koto IX Tarusan.⁷³

3. Demografi

Berdasarkan luas wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lengayang merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas (590, 60 km²/1,35 persen). Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2017 mencapai 457. 285 jiwa, naik sebesar 3.643 jiwa dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian kepadatan penduduknya meningkat dari 78,93 jiwa/km², menjadi 79,53 Jiwa/km². Kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak selama kurun waktu dari tahun 2013-2017 dalaha Kecamatan Lengayang dengan jumlah penduduk sebanyak 52.592 jiwa. Adapun Kecamatan yang jumlah penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Bayang yaitu 474, 59 jiwa/km². Kecamatan yang paling sedikit yaitu sebesar 7.277 jiwa dan sekaligus paling rendah kepadatan penduduknya yaitu sebesar 29,02 jiwa/km² adalah Kecamatan IV Nagari Byang Utara.

Menurut survei yang dilakukan BPS Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 60,22 persen dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun merupakan angkatan kerja yang terdiri dari yang

⁷³ Badan Pusat Stitistik, *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Dalam Angka 2017*. hlm. 63.

bekerja atau sementara tidak bekerja tapi sebenarnya mempunyai pekerjaan. Sedangkan 36,96 persen adalah bukan angkatan kerja, termasuk di dalamnya 10,23 persen yang masih bersekolah, dan lain-lain sebanyak 25,70 persen. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017 (Jiwa)

No.	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Silaut	13284	13736	14131	14649	15093
2.	Lunang	19622	20129	20548	21077	21530
3.	Basa AB Tapan	13112	13324	13476	13643	13793
4.	Ranah AH Tapan	13935	14269	14539	14872	15159
5.	Pancung Soal	24428	24997	25451	26012	26495
6.	Airpura	14803	15138	15405	15736	16019
7.	Linggo Sari Baganti	43509	44088	44464	44835	45180
8.	Ranah Pesisir	30191	30363	30397	30330	30313
9.	Lengayang	52041	52416	51548	52538	52592
10.	Sutera	47867	48680	49270	49929	50516
11.	Batang Kapas	31111	31341	31430	31438	31480
12.	IV Jurai	44629	45256	45678	46106	46502
13.	Bayang	35743	36928	36945	36829	36781
14.	IV NB Utara	7279	7314	7314	7389	7277
15.	Koto IX Tarusan	48186	48500	48590	48539	48555
Jumlah		440740	446479	450186	453822	457285

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mengalami Peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 Jumlah penduduk

Kabupaten Pesisir Selatan meningkat sebesar 5.739 jiwa dari tahun sebelumnya, tahun 2015 meningkat sebesar 3.707 jiwa, tahun 2016 meningkat sebesar 3.636 jiwa dan tahun 2017 meningkat sebesar 3.463 jiwa dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Lengayang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah selama kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran sektor ekonomi. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil dari perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Peningkatan PDRB secara umum juga diikuti oleh peningkatan secara nominal dari sektor-sektor ekonominya.

Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha (pesen) 2013-2017

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan	3,71	5,55	5,55	2,21	3,16
2	Pertambangan	5,5	3,38	4,64	5,72	2,97
3	Industri Pengolahan	4,83	6,32	4,42	6,7	1,83

4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,85	11,57	4,29	10,12	5,41
5	Pengadaan Air	4,25	4,23	4,18	6,24	4,23
6	Konstruksi	12,73	6,03	6,13	7,75	9,48
7	Perdagangan Besar	7,48	8,76	5,93	6,98	8,02
8	Transpotasi	9,07	8,65	7,98	8,69	8,67
9	Penyediaan Akomodasi	2,34	3,63	7,11	10,95	10,78
10	Informasi dan Komunikasi	9,98	5,96	8,58	9,76	10,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,73	2,78	3,81	6,62	2
12	Real Estate	5,93	5,95	5,97	5,82	5,21
13	Jasa Perusahaan	5,52	5,38	5,4	5,12	5,23
14	Administrasi	2,96	1,23	3,33	5,19	5,14
15	Jasa Pendidikan	8,31	6,36	8,16	9,17	6,97
16	Jasa Kesehatan	7,18	7,73	7,27	5,53	7,9
17	Jasa Lainnya	5,18	5,18	5,22	11,98	8,81
PDRB		5,9	5,8	5,73	5,33	5,42

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan (2019)

Berdasarkan Laju pertumbuhan PDRB dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 sektor konstruksi memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 12,73 persen.

Tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 6,70 persen dan meningkat kembali pada tahun 2015-2017. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,1 persen dari tahun sebelumnya, tahun 2016 sebesar 1,62 persen dan tahun 2017 meningkat sebesar 1,73 persen dari tahun sebelumnya.

B. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis *Location Quotient*, dan analisis *Shift Share*. Analisis ini untuk menentukan

sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan pembangunan perekonomian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Analisis *Location Quotient*

Analisis *Location Quotient* merupakan suatu teknik pengukuran paling terkenal dari model basis dan non basis. Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Dalam penelitian ini daerah yang akan di bandingkan ialah PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017.

Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut di kategorikan sebagai sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional atau Provinsi. Jika nilai $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten lebih kecil dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional atau Provinsi.

Jika $LQ = 1$ maka tingkat spesialisasi Kabupaten sama dengan tingkat spesialisasi di tingkat nasional atau Provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat dan belum mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daerah yang bersangkutan. Berikut hasil perhitungan dengan metode analisis *Location Quotient* Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Analisis *Location Quotient* Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2013-2017

No.	Sektor	Tahun					Rata-rata	Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Pertanian	1,66	1,65	3,4	1,67	1,66	2,01	Basis
2.	Pertambangan	0,85	0,86	1,77	0,9	0,91	1,06	Basis
3.	Industri	0,76	0,77	1,62	0,8	0,8	0,95	Non Basis
4.	Listrik dan Gas	0,32	0,31	0,63	0,31	0,31	0,38	Non Basis
5.	Pengadaan Air	0,72	0,72	1,45	0,71	0,71	0,86	Non Basis
6.	Konstruksi	1,1	1,09	2,21	1,1	1,12	1,32	Basis
7.	Perdagangan Besar	0,75	0,78	1,59	0,79	0,8	0,94	Non Basis
8.	Transpotasi	0,32	0,32	0,06	0,32	0,33	0,27	Non Basis
9.	Akomodasi	0,98	0,95	1,95	0,97	0,98	1,17	Basis
10.	Komunikasi	1,05	1,02	2,08	1,02	1,04	1,24	Basis
11.	Jasa Keuangan	0,76	0,74	1,52	0,73	0,73	0,89	Non Basis
12.	Real Estate	0,72	0,72	1,47	0,72	0,73	0,87	Non Basis
13.	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,25	0,12	0,12	0,14	Non Basis
14.	Administrasi	1,08	1,07	2,14	1,05	1,06	1,28	Basis
15.	Jasa Pendidikan	0,77	0,77	1,57	0,78	0,76	0,93	Non Basis
16.	Jasa Kesehatan	0,95	0,95	1,93	0,94	0,94	1,14	Basis
17.	Jasa Lainnya	0,63	0,62	1,22	0,61	0,61	0,74	Non Basis

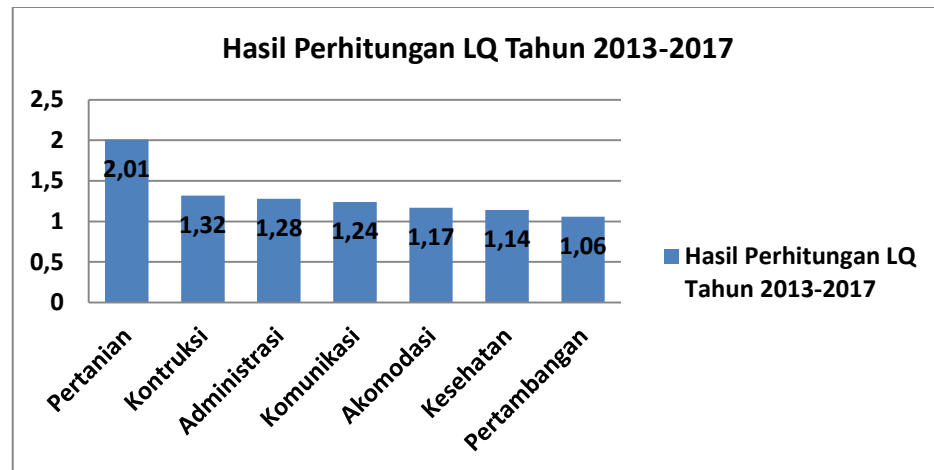
Sumber: Data di olah (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas terdapat tujuh sektor di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan sektor basis, berikut urutan nilai LQ dari tertinggi hingga terendah:

- a. Sektor pertanian dengan nilai rata-rata LQ sebesar 2,01
- b. Sektor kontruksi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,32
- c. Sektor administrasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,28
- d. Sektor komunikasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,24
- e. Sektor penyediaan akomodasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,17

- f. Sektor jasa kesehatan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,14
- g. Sektor pertambangan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,06

Gambar 4.1
Hasil Perhitungan *Location Quotient* Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2013-2017



Dari gambar 4.4 di atas dapat dilihat tujuh sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan. Sektor Pertanian merupakan sektor basis yang memiliki nilai rata-rata LQ tertinggi.

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* merupakan alat untuk membandingkan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah dengan wilayah nasional. Dimana analisis *Shift Share* menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya.

Ada tiga informasi dasar yang dapat diketahui, dimana ketiga komponen tersebut memiliki hubungan satu sama lain yaitu:

a. Komponen *National Share* (N)

Komponen *national share* adalah banyaknya penambahan lapangan kerja regional, seandainya porsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode tertentu. Komponen *Shift* adalah pentimpangan dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional.

Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. *Shift netto* terbagi menjadi dua komponen yaitu *Propotional Shift* dan *Differential Shift*.

b. Komponen *Propotional Shift* (P)

Propotional Shift merupakan struktural, mengukur besarnya *shift regional netto* yang disebabkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor secara nasional tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lebih lambat atau merosot.

c. Komponen *Differential Shift* (D)

Differential Shift dinamakan komponen lokasional atau regional, mengukur besarnya *shift regional netto* yang disebabkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau

lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern.

Berikut adalah hasil perhitungan analisis *Shift Share* PDRB Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan *National Share, Propotional Shift, Differential Shift* Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013-2017

No.	Sektor	NS	P	D
1	Pertanian	783,41679	-240,852145	26,7507733
2	Pertambangan	76,981885	-42,2546204	20,6830309
3	Industri	176,46569	-65,7809197	34,7534534
4	Listrik dan Gas	0,7032569	0,453009628	-0,0844633
5	Pengadaan Air	1,4780369	-0,12654486	-0,0847902
6	Konstruksi	209,46167	54,38015525	18,0728182
7	Perdagangan Besar	259,41932	11,32919909	67,627413
8	Transpotasi	82,78914	39,12875679	8,68956895
9	Akomodasi	22,225384	10,96210976	0,56270884
10	Komunikasi	149,70845	106,034883	-3,002836
11	Jasa Keuangan	44,989537	-7,64698689	-6,1020283
12	Real Estate	29,381944	-1,7993525	2,37588188
13	Jasa Perusahaan	1,1132956	0,057060418	-0,0823239
14	Administrasi	121,89037	-31,86933	-8,461066
15	Jasa Pendidikan	60,175175	32,33204033	-4,3145106
16	Jasa Kesehatan	26,919344	10,27614423	-1,1688343
17	Jasa Lainnya	21,886866	14,23865474	-3,0582091

Sumber: Data di olah (2019)

C. Pembahasan Per Sektor Kabupaten Pesisir Selatan

Sektor ekonomi unggulan adalah sektor yang harus dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor ekonomi unggulan tersebut bukan hanya harus mampu untuk memenuhi permintaan dari dalam daerahnya sendiri akan tetapi juga harus

mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerahnya. Sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan satu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional, maupun nasional.

1. Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ atau sebesar 2,01. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor pertanian komponen P memiliki nilai sebesar -240,852145 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 26,7507733 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor pertanian bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ dan bernilai negatif pada komponen P dan positif di komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Sektor Pertanian

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ > 1$	Sektor Basis
2.	P	Negatif	Tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

2. Sektor Pertambangan

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor pertambangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ atau sebesar 1,06 Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor pertambangan komponen P memiliki nilai sebesar -42,2546204 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 20,6830309 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor pertambangan bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ dan bernilai negatif pada komponen P dan positif pada komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Sektor Pertambangan

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ > 1$	Sektor Basis
2.	P	Negatif	Tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

3. Sektor Industri

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor industri Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata LQ < 1 atau sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor industri komponen P memiliki nilai sebesar -65,7809197 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 34,7534534 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor industri bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, Karena memiliki nilai rata-rata LQ < 1 dan bernilai negatif pada komponen P dan positif di komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Sektor Industri

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	LQ < 1	Sektor Non Basis
2.	P	Negatif	Tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di Olah (2019)

4. Sektor Listrik dan Gas

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor listrik dan gas Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0.38. Hal ini menunjukkan bahwa sektor listrik dan gas merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor listrik dan gas komponen P memiliki nilai sebesar 0,453009628 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar -0,0844633 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor listrik dan gas bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ dan bernilai positif pada komponen P dan negative pada komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Sektor Listrik dan Gas

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

5. Sektor Pengadaan Air

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor pengadaan air Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan air merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor pengadaan air komponen P memiliki nilai sebesar -0,12654486 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar -0,0847902 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor pengadaan air bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ dan bernilai negatif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Sektor Pengadaan Air

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Negatif	Tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di Olah (2019)

6. Analisis Sektor Kontruksi

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor kontruksi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata LQ > 1 atau sebesar 1,32. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kontruksi merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor kontruksi komponen P memiliki nilai sebesar 54,38015525 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 18,0728182 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor kontruksi tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata LQ > 1 karena bernilai positif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Sektor Kontruksi

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	LQ > 1	Sektor Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

7. Perdagangan Besar dan Eceran

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor perdagangan besar dan eceran

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,94. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor perdagangan besar dan eceran Kabupaten Pesisir Selatan komponen P memiliki nilai sebesar 11,32919909 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 67,627413 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor perdagangan besar dan eceran bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ dan bernilai positif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Analisis Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

8. Analisis Sektor Transportasi

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor transportasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,27. Hal ini menunjukkan

bahwa sektor transportasi merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor transportasi komponen P memiliki nilai sebesar 39,12875679 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 8,68956895 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor transportasi bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ dan bernilai positif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Sektor Transportasi

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

9. Analisis Sektor Penyediaan Akomodasi

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor penyediaan akomodasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ atau sebesar 1,17. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor penyediaan akomodasi komponen P memiliki nilai sebesar 10,96210976 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 0,56270884 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor penyediaan akomodasi tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ serta bernilai positif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Analisis Sektor Penyediaan Akomodasi

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ > 1$	Sektor Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

10. Analisis Sektor Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ atau sebesar 1,24. Hal ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor komunikasi komponen P memiliki nilai sebesar 106,034883 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat

nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar -3,0028360 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor komunikasi bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ dan bernilai positif pada komponen P dan negatif pada komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Sektor Komunikasi

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ > 1$	Sektor Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

11. Analisis Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor jasa keuangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,89. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor jasa keuangan komponen P memiliki nilai sebesar -7,64698689 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan

nilai komponen D sebesar -6,1020283 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor jasa keuangan bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ dan bernilai negatif pada komponen P dan komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Sektor Jasa Keuangan

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Negatif	Tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

12. Analisis Real Estate

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor real estate Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa sektor real estate merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor real estate komponen P memiliki nilai sebesar -1,7993525 berarti sektor ini tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar 2,37588188 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor real estate bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ dan bernilai negatif pada komponen P dan positif pada komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Sektor Real Estate

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Negatif	Tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat
3.	D	Positif	Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

13. Analisis Jasa Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2017 sektor perusahaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa perusahaan merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share* sektor jasa perusahaan komponen P memiliki nilai sebesar 0,057060418 berarti sektor ini tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan nilai komponen D sebesar -0,0823239 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis diatas maka sektor jasa perusahaan bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai rata-rata $LQ <$

1 serta bernilai positif pada komponen P dan negatif pada komponen D.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Hasil Analisis Jasa Perusahaan

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

14. Sektor Administrasi

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang Tahun 2013-2017 sektor administrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ atau sebesar 1,28. Hal ini menunjukkan bahwa sektor administrasi merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share*, sektor administrasi komponen P memiliki nilai sebesar -31,86933 tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki nilai sebesar -8,461066 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis di atas maka sektor administrasi tidak tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai $LQ > 1$ dan bernilai negatif pada komponen P dan D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Sektor Administrasi

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ > 1$	Sektor Basis
2.	P	Negatif	Tumbuh lebih lambat di tingkat nasional atau Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

15. Sektor Jasa Pendidikan

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang Tahun 2013-2017 sektor jasa pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa pendidikan merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share*, sektor jasa pendidikan komponen P memiliki nilai sebesar 32,33204033 tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki nilai sebesar -4,3145106 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis di atas maka sektor jasa pendidikan bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai $LQ < 1$ dan bernilai positif pada komponen P dan negatif pada komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Hasil Analisis Sektor Jasa Pendidikan

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

16. Analisis Sektor Jasa Kesehatan

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang Tahun 2013-2017 sektor jasa kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ atau sebesar 1,14. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa kesehatan merupakan sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share*, sektor jasa kesehatan komponen P memiliki nilai sebesar 10,27614423 tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki nilai sebesar -1,1688343 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis di atas maka sektor jasa kesehatan bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai $LQ > 1$ dan bernilai positif pada komponen P dan negatif pada komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Hasil Analisis Sektor Jasa Pendidikan

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ > 1$	Sektor Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

17. Analisis Sektor Jasa Lainnya

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui bahwa sepanjang Tahun 2013-2017 sektor jasa lainnya Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai rata-rata $LQ < 1$ atau sebesar 0,74. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa lainnya merupakan sektor non basis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis *Shift Share*, sektor jasa lainnya komponen P memiliki nilai sebesar 14,23865474 tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komponen D memiliki nilai sebesar -3,0582091 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis di atas maka sektor jasa lainnya bukan tergolong ke dalam sektor unggulan, karena memiliki nilai $LQ < 1$ dan bernilai positif pada komponen P dan negatif pada komponen D. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Analisis Sektor Jasa Lainnya

No.	Aspek	Parameter	Makna
1.	LQ	$LQ < 1$	Sektor Non Basis
2.	P	Positif	Tumbuh lebih cepat di tingkat nasional atau Sumatera Barat
3.	D	Negatif	Tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data di olah (2019)

D. Sektor Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan

Sektor unggulan adalah sektor yang dikembangkan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan tersebut bukan hanya harus mampu untuk memenuhi permintaan dari dalam daerahnya sendiri tetapi juga harus mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerahnya. Dengan dua alat analisis yang telah digunakan yaitu analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift Share* (SS) maka sektor unggulan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22
Sektor Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2013-2017

No.	Sektor	LQ	Shift Share		Keterangan
			P	D	
1.	Konstruksi	> 1	+	+	Unggulan
2.	Akomodasi	> 1	+	+	Unggulan
3.	Pertanian	> 1	-	+	Bukan Unggulan
4.	Pertambangan	> 1	-	+	Bukan Unggulan
5.	Komunikasi	> 1	+	-	Bukan Unggulan
6.	Administrasi	> 1	-	-	Bukan Unggulan
7.	Kesehatan	> 1	+	-	Bukan Unggulan
8.	Industri	< 1	-	+	Bukan Unggulan
9.	Listrik dan Gas	< 1	+	-	Bukan Unggulan
10.	Pengadaan Air	< 1	-	-	Bukan Unggulan

11.	Perdagangan Besar	< 1	+	+	Bukan Unggulan
12.	Transportasi	< 1	+	+	Bukan Unggulan
13.	Keuangan	< 1	-	-	Bukan Unggulan
14.	Real Estate	< 1	-	+	Bukan Unggulan
15.	Prusahaan	< 1	+	-	Bukan Unggulan
16.	Pendidikan	< 1	+	-	Bukan Unggulan
17.	Jasa Liannya	< 1	+	-	Bukan Unggulan

Sumber: Data di olah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.22 di atas dapat dilihat bahwa setelah di analisis yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan ada dua sektor yaitu: sektor kontruksi dan sektor akomodasi. Kedua sektor tersebut bisa menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan karena memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penentuan sektor unggulan yaitu memiliki nilai rata-rata $LQ > 1$ dan bernilai positif pada komponen *Propotional Shift (P)* dan komponen *Differential Shift (D)* pada analisis *Shift Share*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ekaristi Jekna yang berjudul “Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan”. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah sektor kontruksi.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sedemikian mungkin agar peneliti memperoleh hasil sebaik mungkin. Namun demikian masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu rentang waktu yang dipakai dalam penelitian ini cukup rendah. Karena hanya meneliti lima tahun saja, diaman batas penelitian ini hanya sampai pada tahun 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan yaitu analisis *Location Quotient* dan analisis *Shift Share* di Kabupaten Pesisir Selatan maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Sektor pertanian merupakan sektor basis yang memiliki indeks terbesar dibandingkan dengan enam sektor lainnya yang juga merupakan sektor basis yaitu sektor pertambangan, konstruksi, administrasi, komunikasi, penyediaan akomodasi, dan jasa kesehatan. Ketujuh sektor basis ini merupakan modal yang cukup baik perkembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* di Kabupaten Pesisir Selatan sektor yang termasuk ke dalam sektor basis ($LQ > 1$) ada tujuh sektor yaitu sektor pertanian, konstruksi, administrasi, komunikasi, dan penyediaan akomodasi. Sektor non basis yaitu sektor industri, listrik dan gas, pengadaan air, perdagangan besar dan eceran, transportasi, keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, pendidikan, dan jasa lainnya.
3. Berdasarkan hasil perhitungan analisis *Shift Share* sektor yang memiliki potensi dan daya saing atau memiliki nilai *Proportional Shift* dan *Differential Shift* yang bernilai positif adalah sektor

kontruksi dan akomodasi. Maka kedua sektor ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas peneliti menyarankan beberapa hal untuk pihak terkait terutama pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Sektor kontruksi dan akomodasi yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan harus dikelola dengan lebih baik lagi agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seharusnya lebih memperhatikan lagi sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor listrik dan sektor lainnya. Karena sektor-sektor tersebut masih dapat berkembang apabila dikelola dengan baik tidak kemungkinan dapat menjadi sektor unggulan.
3. Penelitian ini masih terbatas pada tahap menentukan sektor- sektor unggulan, sehingga kepada peneliti lainnya di sarankan untuk melanjutkan penelitian sampai pada tahapan menentukan sub sektor dan komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nugroho Iwan, *Pembangunan Wilayah*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Kuncoro Mudrajad, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Morisan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Huda Nurul, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Pramedia Group, 2015.
- Bakry Oermar, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara, 1972.
- Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Samuelson & Nerlove, *Ilmu Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Media Edukasi, 2004.
- Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sirojuzilam, *Pembangunan Ekonomi Regional*, Medan: USU Pers, 2015.
- _____ & Kasyful Mahali, *Regional Pembangunan, Perencanaan Dan Ekonomi*, Medan USU Pers, 2010.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif *dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

_____, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2005.

Tarigan Robinson, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Sumber Lainnya:

Aditiya Nugraha Putra, "Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Yogyakarta", Skripsi, UN Syarifhidayatullah Jakarta, 2013.

Ahmad Rizani, "Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Subsektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan di Kabupaten Jember", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017.

Almizan, Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif Islam, dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, No 2, Juli-Desember 2016.

Anna Yulita, "Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Kemiring Ilir", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume. 7, No. 2, Desember 2009.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Dalam Angka 2017*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Prinsip dasar Pembangunan Daerah*, <https://www.bappenas.go.id>, diakses 30 April 2019 pukul 10:10 WIB.

Bambang Kurniawan, "Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari- Juni 2016.

Departemen Agama RI, Al -Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2005.

_____, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Solo: Tiga Serangkai, 2009.

Dodik Surya, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Ngawi", Thesis, PPs UNS Surakarta, 2012.

Ekaristi Jekna Mengilaleng, dkk, "Analisis Sektor Unggulan Minahasa Selatan", dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 04, 2015.

- Eka Pratiwi Lumban Toruan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2, No. 2, 2011.
- Fachrurrazy, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB", Tesis, USU, 2009.
- Fitri Amalia, "Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB", dalam *Jurnal Ekonomi* Vol. 11 No. 2, 2012.
- Fenti Putra Halawa, "Penentuan Sektor unggulan Kabupaten/kota di Kepulauan Nias", Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2014.
- M. Iqbal, *Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kabupaten Lamongan*, dalam *jurnal Unesa*, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Putri Melati Adela, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kota Padangsidempuan tahun 2008-2013", Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2016.
- Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017", ©Badan Pusat statistik, No.9302021.1302, Kabupaten Pesisir selatan, CV. Adyta, 2017.
- Saedah Afri Tanjung, "Penentuan sektor Unggulan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Periode 2013-2015 Dengan Pendekatan *Location Quotient* dan *Shift Share*", Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017.
- Sapriadi Hasbiullah, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba", dalam *jurnal Iqtisaduna*, Volume 1, No.1, Juni 2015.
- Sharifuddin Husen, "Pengaruh Pengeluaran Anggaran Dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Dan Implikasinya pada Kesejahteraan Sosial", dalam *jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No. 1, Juni 2011.
- Usanatul Hasanah, "Penentuan Subsektor Unggulan Pembentuk PDRB Di Seluruh Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2010", Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : April
Nim : 15 402 00245
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Bukit, 15 Mei 1995
Alamat : Jl. Jamalayu Lubis Lk.IV Sihitang Km. 4,5
Padangsidimpuan Tenggara
Agama : Islam
No. Hp : 0812 6964 0875

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Aliumar
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Jalinur
Pekerjaan : Tani
Alamat : Bukik Padang Barabah Putih Jorong Batu Hampar

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2002508 Padangsidimpuan
2. SMP Negeri 8 Padangsidimpuan
3. SMK Negeri 1 Batang Angkola

4. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Konstan (Ribuan Rupiah), 2013-2017

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	2797,6	2952,74	3116,57	3185,51	3286,24
2	Pertambangan	272,89	283,48	296,63	313,6	322,92
3	Industri Pengolahan	613,71	652,49	681,3	726,92	740,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,18	2,43	2,54	2,8	2,95
5	Pengadaan Air	5,16	5,37	5,6	5,95	6,2
6	Konstruksi	661,83	701,76	744,81	802,54	878,64
7	Perdagangan Besar	817,24	888,87	941,56	1007,36	1088,2
8	Transportasi	250,61	272,28	294,01	319,56	347,28
9	Akomodasi	68,34	70,82	75,85	84,16	93,23
10	Informasi dan Komunikasi	448,39	475,11	515,86	566,21	627,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	162,64	167,16	173,52	185,01	188,72
12	Real Estate	98,77	104,64	110,7	117,14	123,25
13	Jasa Perusahaan	3,8	4,01	4,23	4,44	4,67
14	Administrasi	441,95	447,41	462,3	486,3	511,3
15	Jasa Pendidikan	187,88	199,84	216,15	235,97	252,42
16	Jasa Kesehatan	85,82	92,45	99,17	104,66	112,92
17	Jasa Lainnya	68,08	71,6	75,34	84,37	91,81
Produk Domestik Regional Bruto		6986,89	7392,46	7816,14	8232,5	8678,97

Lampiran 2

Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan
(Ribu Rupiah), 2013-2017

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	30372,99	32151,48	33546,75	34222,56	35387,63
2	Pertambangan	5722,82	5923,56	6144,57	6267,6	6338,26
3	Industri Pengolahan	14388,52	15140,07	15418,54	16174,09	16540
4	Listrik dan Gas	120,83	140	145,68	161,62	168,19
5	Pengadaan Air	128,68	133,69	141,7	150,77	156,73
6	Konstruksi	10825,24	11523,57	12315,04	13126,83	14075,89
7	Perdagangan	19442,01	20523,14	21626,6	22796,93	24279,26
8	Transportasi	13877,71	14929,94	162259,29	17506,91	18749,69
9	Akomodasi	1248,91	1329,39	1420,41	1557,1	1693,49
10	Informasi dan Komunikasi	7676,46	8322,87	9080,55	9934,33	10802,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3856,67	4041,34	4188,23	4524,38	4619,8
12	Real Estate	2472,32	2609,89	2748,09	2895,55	3025,61
13	Jasa Perusahaan	547,78	585,98	620,6	651,28	685,06
14	Administrasi	7362,76	7511,11	7895,34	8286,94	8659,07
15	Jasa Pendidikan	4357,63	4657,61	5022,03	5416,44	5954,62
16	Jasa Kesehatan	1620,72	1749,92	1881,29	1984,29	2154,58
17	Jasa Lainnya	1918,49	2067,17	2264,68	2476,53	2673,38
Produk Domestik Regional Bruto		125940,54	133340,73	286719,39	148134,15	155963,89

Lampiran 3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kbaupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2-17 (Persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	3,71	5,55	5,55	2,21	3,16
2	Pertambangan	5,5	3,38	4,64	5,72	2,97
3	Industri	4,83	6,32	4,42	6,7	1,83
4	Listrik dan Gas	-2,85	11,57	4,29	10,12	5,41
5	Pengadaan Air	4,25	4,23	4,18	6,24	4,23
6	Konstruksi	12,73	6,03	6,13	7,75	9,48
7	Perdagangan	7,48	8,76	5,93	6,98	8,02
8	Transpotasi	9,07	8,65	7,98	8,69	8,67
9	Penyediaan Akomodasi	2,34	3,63	7,11	10,95	10,78
10	Informasi dan Komunikasi	9,98	5,96	8,58	9,76	10,91
11	Jasa Keuangan	6,73	2,78	3,81	6,62	2
12	Real Estate	5,93	5,95	5,97	5,82	5,21
13	Jasa Perusahaan	5,52	5,38	5,4	5,12	5,23
14	Administrasi	2,96	1,23	3,33	5,19	5,14
15	Jasa Pendidikan	8,31	6,36	8,16	9,17	6,97
16	Jasa Kesehatan	7,18	7,73	7,27	5,53	7,9
17	Jasa Lainnya	5,18	5,18	5,22	11,98	8,81
PDRB		5,9	5,8	5,73	5,33	5,42

Lampiran 4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2-17 (Persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	3,72	5,86	4,34	2,01	3,4
2	Pertambangan	7,55	3,51	3,73	2	1,13
3	Industri Pengolahan	5,1	5,22	1,84	4,9	2,26
4	Listrik dan Gas	3,42	15,87	4,05	10,94	4,06
5	Pengadaan Air	4,92	3,89	5,99	6,4	3,96
6	Konstruksi	10,3	6,45	6,87	6,59	7,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran	6,31	5,56	5,38	5,41	6,5
8	Transportasi dan Pergudangan	8,47	7,58	8,9	7,67	7,1
9	Penyediaan Akomodasi	5,9	6,44	6,85	9,62	8,76
10	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,42	9,1	9,4	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,91	4,79	3,63	8,03	2,11
12	Real Estate	5,5	5,56	5,3	5,37	4,49
13	Jasa Perusahaan	77,3	6,97	5,91	4,94	5,19
14	Administrasi Pemerintahan	1,75	2,01	5,12	4,96	4,49
15	Jasa Pendidikan	8,39	6,88	7,82	7,85	9,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,76	7,97	7,51	5,47	8,58
17	Jasa Lainnya	5,3	7,75	9,55	9,35	7,95
PDRB		6,08	5,88	5,53	5,27	5,29

Lampiran 5

Distribusi Presentase PDRB Sumatera Barat ADHB Tahun 2013-2017 (persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,68	24,99	24,69	24,02	23,55
2	Pertambangan dan Penggalian	4,6	4,88	4,82	4,52	4,26
3	Industri Pengolahan	11,02	10,56	10,18	10,08	9,71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,1	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	8,77	9,09	9,38	9,27	9,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran	14,77	14,38	14,61	14,87	15,05
8	Transportasi dan Pergudangan	11,23	11,76	12,23	12,45	12,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,07	1,13	1,22	1,31	1,35
10	Informasi dan Komunikasi	5,26	5,13	4,85	4,99	5,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	3,1	3,1	3,17	3,09
12	Real Estate	1,93	1,97	2	2	1,97
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan Sosial	6,29	5,89	5,7	5,82	5,85
15	Jasa Pendidikan	3,69	3,62	3,67	3,84	4,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,28	1,26	1,27	1,33
17	Jasa Lainnya	1,62	1,63	1,68	1,77	1,84
PDRB		100	100	100	100	100

Lampiran 6
 Hasil Perhitungan LQ Tahun 2013

No.	Sektor	xi	PDRB	xi/PDRB	XI	PNB	XI/PNB	LQ
1	Pertanian	2797,6	6986,89	0,400407	30372,99	125940,5	0,241169	1,660274
2	Pertambangan	272,89	6986,89	0,039057	5722,82	125940,5	0,045441	0,859526
3	Industri	613,71	6986,89	0,087837	14388,52	125940,5	0,114249	0,768827
4	Listrik dan Gas	2,18	6986,89	0,000312	120,83	125940,5	0,000959	0,32521
5	Pengadaan Air	5,16	6986,89	0,000739	128,68	125940,5	0,001022	0,722804
6	Konstruksi	661,83	6986,89	0,094725	10825,24	125940,5	0,085955	1,102023
7	Perdagangan	817,24	6986,89	0,116968	19442,01	125940,5	0,154375	0,757687
8	Transpotasi	250,61	6986,89	0,035869	13877,71	125940,5	0,110193	0,325508
9	Akomodasi	68,34	6986,89	0,009781	1248,91	125940,5	0,009917	0,986337
10	Informasi dan Komunikasi	448,39	6986,89	0,064176	7676,46	125940,5	0,060953	1,052874
11	Jasa Keuangan	162,64	6986,89	0,023278	3856,67	125940,5	0,030623	0,760145
12	Real Estate	98,77	6986,89	0,014136	2472,32	125940,5	0,019631	0,720115
13	Jasa Perusahaan	3,8	6986,89	0,000544	547,78	125940,5	0,00435	0,125043
14	Administrasi	441,95	6986,89	0,063254	7362,76	125940,5	0,058462	1,081967
15	Jasa Pendidikan	187,88	6986,89	0,02689	4357,63	125940,5	0,034601	0,777163
16	Jasa Kesehatan	85,82	6986,89	0,012283	1620,72	125940,5	0,012869	0,95447
17	Jasa Lainnya	68,08	6986,89	0,009744	1918,49	125940,5	0,015233	0,639649

Lampiran 7
 Hasil Perhitungan LQ Tahun 2014

No.	Sektor	xi	PDRB	xi/PDRB	XI	PNB	XI/PNB	LQ
1	Pertanian	2952,74	7392,46	0,399426	32151,48	133340,7	0,241123	1,656525
2	Pertambangan	283,48	7392,46	0,038347	5923,56	133340,7	0,044424	0,863204
3	Industri	652,49	7392,46	0,088264	15140,07	133340,7	0,113544	0,777356
4	Listrik dan Gas	2,43	7392,46	0,000329	140	133340,7	0,00105	0,313078
5	Pengadaan Air	5,37	7392,46	0,000726	133,69	133340,7	0,001003	0,724518
6	Konstruksi	701,76	7392,46	0,094929	11523,57	133340,7	0,086422	1,098438
7	Perdagangan	888,87	7392,46	0,12024	20523,14	133340,7	0,153915	0,781211
8	Transpotasi	272,28	7392,46	0,036832	14929,94	133340,7	0,111968	0,328951
9	Akomodasi	70,82	7392,46	0,00958	1329,39	133340,7	0,00997	0,960898
10	Informasi dan Komunikasi	475,11	7392,46	0,06427	8322,87	133340,7	0,062418	1,029663
11	Jasa Keuangan	167,16	7392,46	0,022612	4041,34	133340,7	0,030308	0,746072
12	Real Estate	104,64	7392,46	0,014155	2609,89	133340,7	0,019573	0,723185
13	Jasa Perusahaan	4,01	7392,46	0,000542	585,98	133340,7	0,004395	0,123434
14	Administrasi	447,41	7392,46	0,060522	7511,11	133340,7	0,05633	1,074423
15	Jasa Pendidikan	199,84	7392,46	0,027033	4657,61	133340,7	0,03493	0,773915
16	Jasa Kesehatan	92,45	7392,46	0,012506	1749,92	133340,7	0,013124	0,952933
17	Jasa Lainnya	71,6	7392,46	0,009686	2067,17	133340,7	0,015503	0,624756

Lampiran 8
 Hasil Perhitungan LQ Tahun 2015

No.	Sektor	xi	PDRB	xi/PDRB	XI	PNB	XI/PNB	LQ
1	Pertanian	3116,57	7816,14	0,398735	33546,75	286791,39	0,116973	3,40879
2	Pertambangan	296,63	7816,14	0,037951	6144,57	286791,39	0,021425	1,771321
3	Industri	681,3	7816,14	0,087166	15418,54	286791,39	0,053762	1,621321
4	Listrik dan Gas	2,54	7816,14	0,000325	145,68	286791,39	0,000508	0,639746
5	Pengadaan Air	5,6	7816,14	0,000716	141,7	286791,39	0,000494	1,45008
6	Konstruksi	744,81	7816,14	0,095291	12315,04	286791,39	0,042941	2,219134
7	Perdagangan	941,56	7816,14	0,120464	21626,6	286791,39	0,075409	1,597473
8	Transpotasi	294,01	7816,14	0,037616	162259,3	286791,39	0,565775	0,066485
9	Akomodasi	75,85	7816,14	0,009704	1420,41	286791,39	0,004953	1,959366
10	Informasi dan Komunikasi	515,86	7816,14	0,065999	9080,55	286791,39	0,031663	2,08446
11	Jasa Keuangan	173,52	7816,14	0,0222	4188,23	286791,39	0,014604	1,520172
12	Real Estate	110,7	7816,14	0,014163	2748,09	286791,39	0,009582	1,478055
13	Jasa Perusahaan	4,23	7816,14	0,000541	620,6	286791,39	0,002164	0,250093
14	Administrasi	462,3	7816,14	0,059147	7895,34	286791,39	0,02753	2,148458
15	Jasa Pendidikan	216,15	7816,14	0,027654	5022,03	286791,39	0,017511	1,579246
16	Jasa Kesehatan	99,17	7816,14	0,012688	1881,29	286791,39	0,00656	1,934186
17	Jasa Lainnya	75,34	7816,14	0,009639	2264,68	286791,39	0,007897	1,220654

Lampiran 9
 Hasil Perhitungan LQ Tahun 2016

No.	Sektor	xi	PDRB	xi/PDRB	XI	PNB	XI/PNB	LQ
1	Pertanian	3185,51	8232,5	0,386943	34222,56	148134,15	0,231024	1,674904
2	Pertambangan	313,6	8232,5	0,038093	6267,6	148134,15	0,04231	0,900323
3	Industri	726,92	8232,5	0,088299	16174,09	148134,15	0,109185	0,808705
4	Listrik dan Gas	2,8	8232,5	0,00034	161,62	148134,15	0,001091	0,311736
5	Pengadaan Air	5,95	8232,5	0,000723	150,77	148134,15	0,001018	0,71011
6	Konstruksi	802,54	8232,5	0,097484	13126,83	148134,15	0,088614	1,100095
7	Perdagangan	1007,36	8232,5	0,122364	22796,93	148134,15	0,153894	0,795118
8	Transpotasi	319,56	8232,5	0,038817	17506,91	148134,15	0,118183	0,328448
9	Akomodasi	84,16	8232,5	0,010223	1557,1	148134,15	0,010511	0,972552
10	Informasi dan Komunikasi	566,21	8232,5	0,068777	9934,33	148134,15	0,067063	1,025563
11	Jasa Keuangan	185,01	8232,5	0,022473	4524,38	148134,15	0,030542	0,7358
12	Real Estate	117,14	8232,5	0,014229	2895,55	148134,15	0,019547	0,727943
13	Jasa Perusahaan	4,44	8232,5	0,000539	651,28	148134,15	0,004397	0,12267
14	Administrasi	486,3	8232,5	0,059071	8286,94	148134,15	0,055942	1,055926
15	Jasa Pendidikan	235,97	8232,5	0,028663	5416,44	148134,15	0,036564	0,78391
16	Jasa Kesehatan	104,66	8232,5	0,012713	1984,29	148134,15	0,013395	0,949072
17	Jasa Lainnya	84,37	8232,5	0,010248	2476,53	148134,15	0,016718	0,61301

Lampiran 10
 Hasil Perhitungan LQ Tahun 2017

No.	Sektor	xi	PDRB	xi/PDRB	XI	PNB	XI/PNB	LQ
1	Pertanian	3286,24	8678,97	0,378644	35387,63	155963,89	0,226896	1,668798
2	Pertambangan	322,92	8678,97	0,037207	6338,26	155963,89	0,040639	0,915547
3	Industri	740,23	8678,97	0,08529	16540	155963,89	0,10605	0,804243
4	Listrik dan Gas	2,95	8678,97	0,00034	168,19	155963,89	0,001078	0,315194
5	Pengadaan Air	6,2	8678,97	0,000714	156,73	155963,89	0,001005	0,710879
6	Konstruksi	878,64	8678,97	0,101238	14075,89	155963,89	0,090251	1,121737
7	Perdagangan	1088,2	8678,97	0,125384	24279,26	155963,89	0,155672	0,805432
8	Transpotasi	347,28	8678,97	0,040014	18749,69	155963,89	0,120218	0,332845
9	Akomodasi	93,23	8678,97	0,010742	1693,49	155963,89	0,010858	0,989302
10	Informasi dan Komunikasi	627,99	8678,97	0,072358	10802,63	155963,89	0,069264	1,04467
11	Jasa Keuangan	188,72	8678,97	0,021745	4619,8	155963,89	0,029621	0,734092
12	Real Estate	123,25	8678,97	0,014201	3025,61	155963,89	0,019399	0,732032
13	Jasa Perusahaan	4,67	8678,97	0,000538	685,06	155963,89	0,004392	0,122502
14	Administrasi	511,3	8678,97	0,058913	8659,07	155963,89	0,05552	1,06111
15	Jasa Pendidikan	252,42	8678,97	0,029084	5954,62	155963,89	0,038179	0,761773
16	Jasa Kesehatan	112,92	8678,97	0,013011	2154,58	155963,89	0,013815	0,941812
17	Jasa Lainnya	91,81	8678,97	0,010578	2673,38	155963,89	0,017141	0,617142

Lampiran 11

Hasil Perhitungan National Share, Propotional Share, Differential Share

No.	Sektor	NS	P	D
1	Pertanian	783,41679	-240,852145	26,7507733
2	Pertambangan	76,981885	-42,2546204	20,6830309
3	Industri	176,46569	-65,7809197	34,7534534
4	Listrik dan Gas	0,7032569	0,453009628	-0,0844633
5	Pengadaan Air	1,4780369	-0,12654486	-0,0847902
6	Konstruksi	209,46167	54,38015525	18,0728182
7	Perdagangan Besar	259,41932	11,32919909	67,627413
8	Transpotasi	82,78914	39,12875679	8,68956895
9	Penyediaan Akomodasi	22,225384	10,96210976	0,56270884
10	Komunikasi	149,70845	106,034883	-3,002836
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,989537	-7,64698689	-6,1020283
12	Real Estate	29,381944	-1,7993525	2,37588188
13	Jasa Perusahaan	1,1132956	0,057060418	-0,0823239
14	Administrasi	121,89037	-31,86933	-8,461066
15	Jasa Pendidikan	60,175175	32,33204033	-4,3145106
16	Jasa Kesehatan	26,919344	10,27614423	-1,1688343
17	Jasa Lainnya	21,886866	14,23865474	-3,0582091